

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara Republik Indonesia, pemerintah mempunyai peran yang penting. Pemerintah sendiri harus saling bekerja sama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, pada zaman sekarang kewenangan pemerintah pusat dibatasi karena adanya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan pembangunan berbasis pada daerah (Otonomi Daerah). Hal ini ditandai dengan pengalihan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundangan-undangan. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu memberdayakan diri sendiri (mandiri), mengelola dan membiayai pembangunan bagi daerahnya sendiri (Wati dan Catur, 2017).

Otonomi daerah yang berlaku menuntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi bantuan dan bagian dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terdapat pendapatan yang juga mencakup pendapatan asli daerah

(PAD). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Simanjuntak, 2018). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu daerah, sehingga banyak daerah yang bergantung pada pendapatan asli daerah (PAD). Dalam hal ini daerah Papua menganggap bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hal yang penting untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan daerahnya. PAD perlu terus ditingkatkan karena dapat membantu memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dan menunjukkan pula kemandirian dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator umum yang digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian disuatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Pada setiap kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat sedang menjalankan proses pembangunan daerahnya untuk mensejajarkan dengan daerah-daerah lain. Proses pembangunan daerah tentu saja memerlukan anggaran yang di dapatkan dari pemerintah daerah. Anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya yaitu diambil dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu berbagai usaha terus dilakukan guna meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD guna untuk membangun daerah. Dilihat dari data Bappeda

historis data pendapatan daerah selama periode 2013-2016 cenderung setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 14,61% per tahun. Dimana yang paling tinggi pertumbuhannya secara normal selama ini adalah Pendapatan Asli daerah yaitu rata-rata 17,35% untuk periode yang sama. Meskipun kontribusinya masih jauh dibawah pendapatan transfer akan tetapi kinerja pencapaian PAD terlihat lebih baik dalam komposisi pendapatan daerah Provinsi Papua. Dapat dikatakan setiap tahunnya rasio pencapaian target PAD selalu diatas 100% per tahun. Peningkatan PAD sendiri harus dilihat dari pertumbuhan dari sumber-sumber PAD antara lain: Pertumbuhan Pajak Daerah, Pertumbuhan Retribusi Daerah, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, dan Pertumbuhan lain-lain PAD yang sah.

Pertumbuhan Pajak daerah dapat diukur menggunakan laju pertumbuhan, pajak daerah akan bertumbuh apabila pada tahun dasar ke tahun ini mengalami peningkatan. Dengan peningkatan yang terjadi tentu saja akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah sendiri merupakan salah satu sumber yang kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang (UU), dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Pertumbuhan pajak daerah di kedua provinsi sangat berkembang dapat dilihat dari rata-rata tahun 2013-2016 pajak daerah mempunyai rata-rata sebesar 67,4% dimana tentunya menempati urutan pertama dalam menyumbangkan penerimaan ke daerah.

Pertumbuhan retribusi tentu mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah. Pada data Bappeda Provinsi Papua retribusi dilihat dari rata-rata sebesar 5.31% dari tahun 2013-2016 masih sangat kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan lain. Rata-rata tersebut tentu saja dapat di tingkatkan dengan meningkatkan sumber-sumber dari retribusi daerah sendiri. Semakin meningkat pertumbuhan retribusi daerah, maka semakin penerimaan daerah akan stabil atau meningkat. Jika penerimaan daerah meningkat maka pemerintah dikatakan berhasil dalam mengelola daerah. Pertumbuhan retribusi daerah dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jenis-jenis retribusi daerah. Jenis Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ketiga retribusi tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis dari retribusi daerah tersebut. Dengan banyaknya pengelompokan yang terjadi pada jenis retribusi daerah, maka pungutan yang diterima daerah juga akan semakin banyak. Pungutan tersebut menjadi dasar penerimaan daerah yang akan menambah penerimaan pada retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan besaran dalam PDRB. Selain itu, merupakan indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting bagi pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam RPJMD Provinsi Papua kondisi perekonomian Provinsi Papua mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016). Hal ini terjadi Ketika produksi pertambangan mengalami gangguan akibat permasalahan internal perusahaan PT Freeport Indonesia, dimana pada tahun 2012 dan 2014 pertumbuhan ekonomi yang dihitung mengalami kontraksi cukup dalam, yang tercatat 1,72% dan 3,81%. Sementara pada tahun 2013 mengalami peningkatan signifikan mencapai angka 8,55%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi melemah yang mencapai 7,47% dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi menguat hingga 9,21%. Dalam mengembangkan perekonomian suatu daerah, dapat dilakukan dengan meningkatkan distribusi perdagangan dan lapangan usaha yang akan meningkatkan produk domestik regional bruto, peningkatan tersebut akan meningkatkan pajak daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah termasuk dalam jenis golongan pendapatan meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai tukar terhadap rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain dipisahkan sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah cukup jelas disebutkan pada pasal 6 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Firdausy, 2017). Pertumbuhan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Provinsi Papua dalam strukturnya terhadap PAD mendapatkan rata-rata sebesar 23,59%. Hasil rata-rata yang di dapatkan ini sangat membantu PAD selain dari pajak daerah.

Pertumbuhan lain-lain pendapatan asli daerah dilihat dari data Bappeda Papua di didapatkan sebesar 23,59% dimana kedudukannya kedua tertinggi yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Jika mengalami pertumbuhan setiap tahunnya tentu saja akan sangat membantu perekonomian daerah guna membangun daerah untuk lebih sejahtera.

Penelitian yang berkaitan dengan variabel independen dan dependen seperti: pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional bruto, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah ini sebelumnya pernah dilakukan oleh lima (5) peneliti terdahulu meskipun ada beberapa variabel dan hasil yang berbeda dan juga menggunakan pengukuran yang berbeda. Perbedaan hasil tentu saja disebabkan karena ukuran yang digunakan dan juga setiap daerah tentu saja mempunyai realisasi yang berbeda. Penelitian pertama dilakukan oleh Pratiwi (2018) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel produk domestik regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nuzulistyan, dkk (2017) di Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan, retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Riana (2016) di Kota Medan menyimpulkan bahwa, pajak daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap peningkatan pendapatan asli

daerah. Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Nurafni (2016) di Kota Padang menyimpulkan bahwa pajak daerah, dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian terakhir dilakukan oleh Ikbar (2017) di Kabupaten/ Kota Di Povinsi Jawa Tengah menyimpulkan bahwa, variabel produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional bruto, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan nilai realisasi dari masing-masing variabel indepen dan variabel dependen, sedangkan penelitian ini menggunakan laju pertumbuhan untuk menunjukan kemampuan daerah dalam meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya. Penelitian ini memiliki kesamaan variabel dengan penelitian terdahulu namun, penelitian ini menggunakan subyek penelitian yang berbeda yaitu menggunakan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Papua, karena Papua merupakan salah satu daerah yang sangat bergantung pada pendapatan asli daerah karena digunakan untuk membangun daerah dan juga mendapatkan otonomi khusus dari negara dapat dilihat pada *bpkad.papua.go.id*. Selain itu penelitian ini ingin menguji konsistensi penelitian terdahulu karena hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil. Oleh karena itu, penelitian mengangkat judul **analisis pengaruh pertumbuhan pajak daerah, retribusi**

daerah, pendapatan domestik regional bruto, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2014-2018.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pertumbuhan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua?
2. Apakah Pertumbuhan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua?
3. Apakah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua?
4. Apakah Pertumbuhan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan generalisasi dan menguji kembali dengan mengukur variabel-variabel penelitian yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan domestik regional bruto (PDRB), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan laju pertumbuhan untuk melihat tingkat pertumbuhan yang nantinya

digunakan untuk membangun daerah dengan subyek penelitian yang berbeda yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan dasar dan bukti empiris dalam memahami pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, PDRB, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

2. Kontribusi Praktek

Penelitian ini diharapkan agar setiap pemerintah daerah dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam penelitian untuk dapat mengambil keputusan. Selain itu dapat menyusun strategi anggaran pemerintah dengan tepat.

3. Kontribusi Kebijakan

Dengan penelitian ini, otonomi daerah dan penganggaran keuangan daerah yang ada, dapat diperhatikan dan dijalankan oleh pemerintah daerah sebaik-baik mungkin.